

**EFEKTIVITAS MEDIA CENTER TERHADAP TUGAS-TUGAS TIM
REAKSI CEPAT PUSAT KENDALI OPERASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

SUWANDI CHANDRA
NPM: 1103110170

Program Studi Ilmu Komunikasi

Konsentrasi Humas



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

ABSTRAK**EFEKTIVITAS MEDIA CENTER TERHADAP TUGAS-TUGAS
TIM REAKSI CEPAT PUSAT KENDALI OPERASIBADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN****SUWANDI CHANDRA****NPM: 1103110170**

Pada hakikatnya, manusia memiliki naluri untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang menimpa mereka. Salah satu bahaya tersebut adalah bencana alam. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya di tanggapai secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (emergency respons). Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar elemen dianggap sebagai penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas media center terhadap tugas-tugas tim reaksi cepat pusat kendali operasi badan penanggulangan bencana daerah Kota Medan.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar, sistem komando tanggap darurat bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan untuk mensinergikan dan mengintegrasikan pemanfaatan semua sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, peralatan maupun dana atau anggaran. Sosialisasi mengenai penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah serangkaian kegiatan penyampaian pesan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana alam. Media center tanggap darurat bencana ini merupakan pusat informasi tentang bencana yang terjadi dan perkembangan penanganan bencana tersebut dapat diakses bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi tersebut tidak hanya diperoleh pada papan informasi tetapi dapat juga informasi yang berasal dari nara sumber yang berkompeten terkait penanganan bencana. Media center tanggap darurat bencana merupakan bagian dari struktur organisasi komando tanggap darurat bencana baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan Media Center tanggap darurat bencana adalah seiring dengan beroperasinya komando tanggap darurat di suatu wilayah bencana pada saat masa tanggap darurat

JUDUL : EFEKTIVITAS MEDIA CENTER TERHADAP TUGAS-TUGAS TIM REAKSI CEPAT PUSAT KENDALI OPERASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia memiliki naluri untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang menimpa mereka. Salah satu bahaya tersebut adalah bencana alam. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*). Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar elemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi.

Bencana dapat terjadi, karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*) masyarakat. Bila terjadi *hazard*, tetapi masyarakat tidak rentan, maka berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu, sementara bila kondisi masyarakat rentan, tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi bencana. Penanggulangan bencana pada dasarnya berupaya

untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya *hazard* maupun mengatasi kerentanan.

Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga

Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.

Dimensi baru dari rangkaian peraturan tersebut adalah (1) Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan pro aktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi; (2) Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi; (3) Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan terhadap bencana.

Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana di daerah.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam bagian dua tentang Badan Penanggulangan

Bencana Daerah pasal 19 ayat 1 menyatakan “Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri atas unsur: a) Pengarah penanggulangan bencana; b) pelaksana penanggulangan bencana. Pada pasal 20 dijelaskan tentang fungsi dari BPBD yaitu: a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bencana secara terpadu, terencana dan menyeluruh. Pasal 21 dijelaskan tentang tugas dari BPBD antara lain: a) Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata; b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; f) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; serta i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fenomena bencana alam yang sering terjadi di kota Medan adalah banjir. Belawan adalah daerah yang sering mengalami banjir rob atau banjir laut pasang,

akibatnya ribuan rumah warga terendam. Selain itu, pada bulan Oktober 2015 tujuh wilayah kecamatan di Medan, Sumatera Utara terendam banjir akibat meluapnya Sungai Babura dan Sungai Deli. Dan cukup banyak daerah di kota Medan yang mengalami banjir.

Salah satu yang turut ambil bagian dalam penanggulangan bencana adalah Media Center. Media Center berperan sebagai posko dan pusat informasi. Meningkatkan penyebaran informasi terkait perkembangan penanganan bencana diperlukan adanya sosialisasi tentang media center tanggap darurat bencana. Diperlukan media penyebaran informasi terkait bencana yang mudah diakses dan terbukti benar dalam penyebaran informasi. Maka diperlukan adanya media center tanggap darurat bencana yang bertugas dalam penyebaran informasi perkembangan kejadian bencana.

Media center tanggap darurat bencana ini merupakan pusat informasi tentang bencana yang terjadi dan perkembangan penanganan bencana tersebut dapat diakses bagi masyarakat, media, dan pihak-pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut tidak hanya diperoleh pada papan informasi tetapi dapat juga informasi yang berasal dari narasumber yang berkompeten terkait dengan penanganan bencana.

Tim Reaksi Cepat (TRC) merupakan Tim yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, pada saat tanggap darurat, meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian dalam penanggulangan bencana. Dari informasi tentang kejadian awal bencana, kemudian Pemerintah atau instansi terkait biasanya langsung menugaskan Tim

Reaksi Cepat (TRC) untuk segera melakukan tugas pengkajian ke lokasi bencana secara cepat dan tepat serta memberikan dukungan dalam kegiatan tanggap darurat. Hasil kajian TRC akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah atau instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya atau untuk menetapkan status atau tingkat bencana.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini diberi judul **“Efektivitas Media Center Terhadap Tugas-Tugas Tim Reaksi Cepat Pusat Kendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah efektivitas media center terhadap tugas-tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) pusat kendali operasi badan penanggulangan bencana daerah Kota Medan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas media center terhadap tugas-tugas tim reaksi cepat pusat kendali operasi badan penanggulangan bencana daerah Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu komunikasi dan menambah kajian ilmu komunikasi khususnya bagaimana efektivitas media center terhadap tugas-tugas tim reaksi cepat pusat kendali operasi badan penanggulangan bencana daerah kota medan

- b. Manfaat akademis
- c. Mengembangkan wawasan keilmuan dan kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya serta bahan bandingan bagi calon peniliti selanjutnya
- d. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang menggunakan media center khususnya Tim Reaksi Cepat dalam pengambilan keputusan guna menentukan kebijaksanaan tim tersebut.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembuatan skripsi.

Pada penelitian ini sistematika penulisan nya adalah:

Bab I: pendahuluan

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, model teorititis, operasional variabel, defenisi operasional, anggapan dasar, dan sistematika penulisan.

Bab II: Uraian Teorititis

Berisikan teoritis yang berhubungan dengan penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Berisikan tentang metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Analisis Hasil Penelitian

Mencakup keseluruhan penyajian data dan pembahasannya

Bab V: Penutup

Yang terdiri dari berbagai kesimpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Komunikasi

a. Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya *Communication* berasal dari kata komunis berarti sama. Pengertian sama yang dimaksud disini adalah sama makna. Menurut William Albig (dalam Djoenaesih, 1983 : 12) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti (mempunyai makna) diantara individu-individu.

Berelson dan Steiner (dalam Fisher, 1978: 10) memberikan definisi komunikasi sebagai penyampaian informasi, ide, emosi, ketrampilan dan seterusnya melalui penggunaan simbol, gambar, angka, grafik, dan lain-lain. Dance (dalam Fisher, 1978: 10) mendefinisikan komunikasi dalam kerangka kerja

psikologi manusia yang luas melalui pendefinisian komunikasi manusia sebagai pengungkapan respon-respon melalui simbol-simbol verbal itu bertindak sebagai perangsang (stimuli) bagi respon yang terungkap tadi. Effendi (1990 : 69) mengungkap bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan kepada media yang menimbulkan efek.

Menurut Edward Depari (dalam Wijaya, 2002: 1-2), komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang-lambang tertentu yang mengandung arti, dilakukan oleh penyampai pesan, ditujukan kepada penerima pesan dengan maksud mencapai kebersamaan (commons).

Sedangkan menurut Wilson (dalam Liliweri, 1992;21) mengatakan komunikasi adalah suatu proses yang menunjukkan kegiatan seorang individu membagi dan mempertukarkan informasi, ide serta sikapnya kepada orang lain.

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan melalui penggunaan simbol / lambang yang dapat menimbulkan efek berupa perubahan tingkah laku yang biasa dilakukan dengan menggunakan media tertentu.

b. Tujuan Komunikasi

Dari defenisi komunikasi di atas, maka komunikasi bukan sekedar penyampaian pesan, melainkan juga dengan tujuan mengubah tingkah laku orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan komunikatornya. Jelasnya komunikasi itu mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Komunikan diharapkan mengerti apa yang disampaikan komunikator.

- b) Komunikator harus mengetahui benar apa yang diinginkan komunikan.
- c) Agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan maka komunikator harus mengadakan pendekatan baik itu secara persuasif maupun koersif kepada komunikan.
- d) Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. (Effendy, 1990:71)

c. Komunikasi Massa

Menurut Cangara (2002:36) komunikasi massa adalah proses komunikasi yang berlangsung diiklana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui media atau alat-alat yang bersifat mekanis, seperti: radio, televisi, surat kabar dan film.

Kemudian Gebner (Rakhmat, 1986: 188) menulis, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki oleh orang dalam masyarakat industri. Selanjutnya menurut Rakhmat (1986: 189), komunikasi massa dapat diartikan sebagai suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang terbesar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan dapat diterima secara serentak dan sesaat.

Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada banyak orang yang berbeda-beda dengan menggunakan saluran-saluran media massa sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.

2. Media Center

Sebagai pusat informasi dan komunikasi, peran media center teramat penting. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan organisasi mana pun memperhitungkan keberadaan media center sebagai organ penting di dalam strukturnya. Media center dirancang untuk mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau. Keberadaan media center juga merupakan sebuah satuan sinergi yang melekat pada lembaga informasi dan informatika tiap daerah yang membutuhkan.

Secara nasional, pemerintah terus memegang komitmen dalam usaha memfasilitasi serta memberi pelayanan informasi publik sesuai dengan amanah Pasal 28 UUD 1945.

Media center memiliki beberapa fungsi. Pertama, menjadi sarana pertukaran informasi antarmedia center di daerah masing-masing, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, dengan ormas, juga media center daerah dengan Kemenkominfo melalui portal berita infopublik serta tabloid Komunika. Fungsi kedua menjadi diseminasi informasi publik sebagai sarana penyebaran informasi yang berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan dampak pada masyarakat. Selanjutnya, fungsi ketiga media center ialah sebagai pelayanan informasi dan komunikasi publik, khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan komunikasi melalui sarana dan prasarana yang dimiliki media center Kemenkominfo.

Ada beberapa parameter yang menentukan apakah media center tersebut sudah ideal atau tidak, antara lain harus mudah diakses publik, terdapat di pusat keramaian, serta dapat memberikan layanan informasi dan komunikasi publik secara tepat. Jam operasional media center yang efektif seharusnya ialah 24 jam yaitu mulai pukul 00.00 sampai pukul 24.00.

Meningkatkan penyebaran informasi terkait perkembangan penanganan bencana diperlukan adanya sosialisasi Peraturan Kepala BNPB tentang media center tanggap darurat bencana. Dalam sambutannya, “ketika pemberitaan kejadian bencana merapi, sulitnya mendapat informasi terkait perkembangan kejadian bencana tersebut. Informasi sangat sulit diperoleh dan beritanya simpang siur. Pemberitaan kejadian bencana tersebut ternyata dimedia terus berlangsung dan belum terbukti benar terkait perkembangan kejadian bencana. Diperlukan media penyebaran informasi terkait bencana yang mudah diakses dan terbukti benar dalam penyebaran informasi. Maka diperlukan adanya media center tanggap darurat bencana yang bertugas dalam penyebaran informasi perkembangan kejadian bencana.

Media Center Tanggap Darurat Bencana ini merupakan pusat informasi tentang bencana yang terjadi dan perkembangan penanganan bencana tersebut dapat diakses bagi masyarakat, media, dan pihak-pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut tidak hanya diperoleh pada papan informasi tetapi dapat juga informasi yang berasal dari narasumber yang berkompeten terkait dengan penanganan bencana. Media Center Tanggap Darurat Bencana merupakan bagian dari struktur organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana baik di tingkat

nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan Media Center tanggap darurat Bencana adalah seiring dengan beroperasinya Komando Tanggap Darurat di suatu wilayah bencana pada saat masa tanggap darurat bencana.

3. Manajemen Bencana (*Disaster Management*)

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dikenal pengertian dan beberapa istilah terkait dengan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana dibagi ke dalam tiga kategori diantaranya:

- 1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 2) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Penanggulangan bencana merupakan proses integral yang satu sama lain sangat bergantung dalam sebuah manajemen penanggulangan bencana yang terpadu dan menyeluruh meliputi:

- 1) Siap siaga adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 2) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 3) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 4) Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Prinsipnya penanggulangan bencana merupakan proses cepat, tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminatif dan berdaya guna. Ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Tidak semua bencana alam menimbulkan resiko bencana. Apabila suatu peristiwa yang memiliki potensi bahaya terjadi di suatu daerah dengan kondisi yang rentan, maka daerah tersebut beresiko terjadi bencana. Jadi resiko dipengaruhi oleh faktor-faktor bahaya (*hazards*), kerentanan (*vulnerability*). Dalam hal ini faktor kapasitas dapat dianggap sebagai bagian dari faktor kerentanan, yang dapat mengurangi kerentanan bila kapasitas daerah tersebut tinggi. Sebaliknya apabila kapasitas daerah rendah maka akan meningkatkan faktor kerentanannya.

Pendekatan proaktif dalam pengurangan resiko bencana merupakan salah satu bagian terpenting dalam mitigasi bencana, yang pada akhirnya ditujukan untuk mengurangi tingkat resiko bencana. Kegiatan mitigasi bencana hendaknya menjadi kegiatan rutin dan berkelanjutan. Hal ini berarti kegiatan mitigasi seharusnya sudah dilakukan dalam periode jauh-jauh hari sebelum kejadian

bencana, yang seringkali datang tidak terduga dari waktu yang diperkirakan, dan bahkan memiliki intensitas yang lebih besar dari perkiraan semula.

Pemerintah hendaknya proaktif untuk memberikan berbagai arahan yang tepat dan berkesinambungan dalam menghadapi peristiwa atau bencana atau dengan kata lain bisa beradaptasi dengan resiko potensi bencana. Perlu diperhatikan bahwa untuk setiap arahan yang ada hendaknya menjaga kesederhanaan sistem dan prosedur. Kletz mengemukakan bahwa "*organizations have no memory: only people have memories and they move on*". Dengan kesederhanaan sistem dan prosedur, diharapkan masyarakat bisa memahami dengan baik, terutama bagi masyarakat yang terkena bencana, sehingga pada saat kejadian bencana dan dalam kondisi darurat, diharapkan mereka mampu menaggapinya serta mereka mampu melakukan proses pemulihan darurat secara mandiri. Inilah yang sebenarnya merupakan salah satu pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan bencana, yang berbasis pada kemampuan pada masyarakat itu sendiri dan bertumpu kepada kemampuan sumberdaya setempat (*community ased disaster management*).

Masyarakat yang menghadapi bencana adalah yang menjadi korban dan dan harus menghadapi kondisi akibat bencana. Oleh karena itu, masyarakat harus membuat perencanaan untuk persiapan dalam menghadapi bencana. Selama ini, tindakan dalam penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan bersama antara pemerintah daerah dengan organisasi-organisasi yang terkait dan masyarakat yang tertimpa bencana. Pada saat menghadapi bencana, masyarakat yang belum mampu untuk menanganinya

sendiri harus menunggu bantuan yang kadang-kadang tidak segera datang. Perlu disadari bahwa detik-detik pertama pada saat bencana terjadi adalah saat yang sangat penting dalam usaha mengurangi dampak bencana yang lebih besar.

Selain untuk keperluan mitigasi, kajian resiko untuk bahaya dari berbagai jenis potensi bahaya alam lebih lanjut dapat juga digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan rencana operasi darurat atau *emergency operation plan* (EOP), atau dalam bentuk SOP yang terjangkau (*achievable/workable*), sederhana dan tepat (*appropriate*). Pada dasarnya EOP dan SOP merupakan kerangka dasar dalam rencana tanggap darurat yang terkoordinasi dan efektif, karena didalamnya telah mendefinisikan peranan dan tanggungjawab seluruh *stakeholder* seperti pemerintah, organisasi swasta, sukarelawan, dan badan-badan lain yang terdapat di dalam suatu negara. Dalam hal ini termasuk perencanaan kegiatan sebelum kejadian bencana dan kesiapsiagaan, perencanaan organisasi, dan kehumasan untuk mengatur aliran informasi, atau dengan kata lain bahwa dalam SOP diperlukan perencanaan terintegrasi, manajemen, dan pendekatan kesiapsiagaan terkait potensi bencana yang ada.

SOP yang efektif akan mencakup berbagai bentuk variasi koordinasi dan cara pengambilan keputusan. Koordinasi sangat penting dilakukan dimana berbagai pihak umumnya akan terlibat dalam penanganan bencana. Selain itu SOP haruslah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound*) dengan ketentuan dasar antara lain meliputi:

- 1) Mendefinisikan berbagai aktifitas apa saja yang harus dilakukan dalam kondisi darurat.

- 2) Menetapkan tolak ukur untuk menilai suatu pencapaian aktivitas.
- 3) Menyusun antisipasi faktor-faktor yang paling beresiko dan usaha-usaha mengurangnya apabila mungkin.
- 4) Membangun jaringan dalam melakukan pertolongan darurat, termasuk di antaranya jaringan informasi.
- 5) Membuat jadwal dengan cermat dan sistematis keseluruhan kegiatan yang diperlukan selama kondisi darurat.

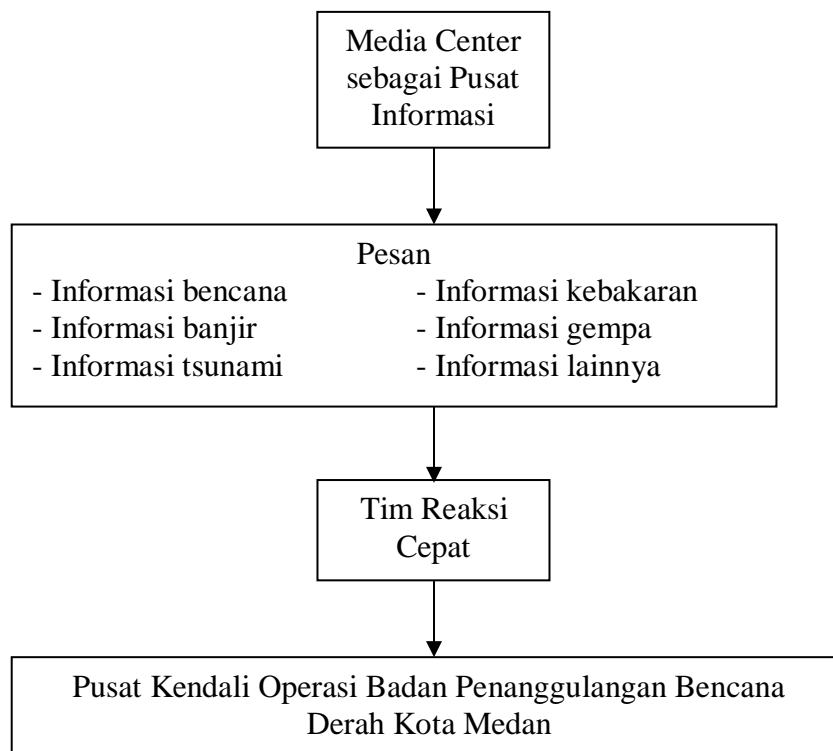
M. Kerangka Konsep

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga

Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.

Pada dasarnya, media center bertugas sebagai posko yang mensuplai informasi bagi TRC (Tim Reaksi Cepat) sebagai pusat kendali operasi badan penanggulangan bencana daerah kota Medan. Efektivitas media center terletak seberapa cepat dan akurat data atau informasi yang diberikan kepada TRC.

Adapun kerangka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan. Metode yang digunakan adalah metode observasi. Metode observasi ialah pengamatan langsung menggunakan alat indera atau alat bantu untuk penginderaan suatu subjek atau objek. Observasi juga merupakan panca indera atau instrumen sebagai alat bantu penginderaan (Purnomo, 2008)

B. KERANGKA KONSEP

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis serta memerlukan bantuan luar dalam penanganannya.

Secara garis besar, upaya penanggulangan bencana meliputi:

1. Kesiapsiagaan: keadaan siap setiap saat bagi setiap orang, petugas serta institusi pelayanan (termasuk pelayanan kesehatan) untuk melakukan tindakan dan cara-cara menghadapi bencana baik sebelum, sedang, maupun sesudah bencana.
2. Penanggulangan: upaya untuk menaggulangi bencana, baik yang ditimbulkan oleh alam maupun manusia, termasuk dampak kerusakan yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitas, dan rekonstruksi

Tujuan dari upaya diatas ialah mengurangi jumlah kesakitan, resiko kecacatan dan kematian pada saat terjadi bencana; mencegah atau mengurangi risiko munculnya penyakit menular dan penyebarannya; dan

mencegah atau mengurangi risiko dan mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat bencana

C. Defenisi Konsep

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Media center merupakan pusat informasi tentang bencana yang terjadi dan perkembangan penanganan bencana tersebut dapat di akses bagi masyarakat, media, dan pihak-pihak yang membutuhkan
- c. Tim Reaksi Cepat (TRC) merupakan tim yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, pada saat tanggap darurat, meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan, dan kerugian dalam penanggulangan bencana.

D. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kategorisasi media center antara lain:

a. Sosialisasi

Sosialisasi penanggulangan bencana di kota Medan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada perangkat pemerintahan, baik pihak eksekutif maupun legislatif, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat pengusaha, media massa, serta masyarakat umum lainnya.

b. Partisipasi

Adanya keterlibatan sukarela dari pihak masyarakat untuk menanggulangi bencana di kota Medan.

c. Pembiayaan/Pendanaan

Sumber dana pelaksanaan Penanggulangan bencana di kota Medan berasal dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan kontribusi swasta, serta swadaya masyarakat.

2. Kategorisasi Efektivitas Media Center terhadap Tugas-tugas Tim Reaksi Cepat antara lain:

a. Pelaksanaan

Pelaksana kegiatan Penanggulangan bencana di kota Medan dilakukan oleh Pemerintah dan bekerja sama dengan masyarakat.

b. Pemanfaatan

Adanya pemanfaatan fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah dalam mengatasi atau menanggulangi bencana di kota Medan.

c. Hasil

Adanya hasil dari pelaksanaan Penanggulangan bencana di kota Medan yang telah terlaksana dan dirasakan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan harapan masyarakat Medan.

E. Informan

Informan adalah pihak-pihak yang dimintai keterangan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah keseluruhan jumlah petugas yang ada di Tim Reaksi Cepat Pusat Kendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari Media Center 4 orang, Tim Reaksi Cepat (TRC) 6 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu melakukan penelitian dengan mengamati langsung lokasi penelitian dan aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab secara langsung dengan pihak-pihak tertentu yang terlibat di dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif karena fokus dari penelitian ini adalah menggambarkan tentang efektivitas media center terhadap tugas-tugas Tim Reaksi Cepat Pusat Kendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

Menurut Ali (1997: 151) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kemampuan nalar pendidikan dalam menghubungkan data, fakta dan informasi yang diperoleh penelitian itu sendiri. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis menghubungkan data dan informasi

yang untuk mengetahui bagaimana efektivitas media center terhadap tugas-tugas Rim Reaksi Cepat Pusat Kendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. Karena penelitian ini memakai penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menganalisis fenomena atau kejadian maka, pengambilan sampelnya tidak ditentukan seperti penelitian kuantitatif (Lexy J. Moleong, 2009: 47).

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Jl. Rahmad No. 1 Komplek PIK Menteng Medan 20228. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari bulan September 2016 s/d April 2017.

Kota medan memiliki luas 26.510 hektare (26.510 km) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah sumatera utara. Dengan demikian dibandingkan dengan kotalainnya, medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota medan terletak pada 3,30-3,43 lintang utara dan 98,35-98,44 bujur timur. Untuk itu topografi kota medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter di atas permukaan laut.

Secara administrasi, batas wilayah medan adalah sebagai berikut:

Utara : Selat Malaka

Selatan : Deli Serdang

Barat : Deli Serdang

Timur : Deli Serdang

VISI BPBD KOTA MEDAN

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas umum kota medan dalam pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam kota medan provinsi sumatera utara yang dapat dipertanggungjawabkan kehadiran publik dan berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada dan tantangan yang dihadapi serta hasil yang diharapkan dalam periode tertentu dalam masa yang akan datang, maka telah dirumuskan visi badan penanggulangan bencana daerah kota medan tahun 2011-2015 sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat kota medan yang waspada dan tangguh terhadap bencana”

MISI BPBD KOTA MEDAN

1. Melindungi masyarakat penanggulangan bencana yang handal
2. Membangun sistem penanggulangan bencana secara terencana
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.PENYAJIAN DATA

Perjalanan penelitian mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan bencana alam di Kota Medan bermula ketika peneliti tertarik dengan beberapa fenomena dan kejadian bencana alam di Indonesia, baik dari sumber media cetak, internet, atau pun televisi. Sehingga terlintas dalam benak pikiran peneliti bahwa permasalahan mengenai kebencanaan sepertinya cukup menarik untuk dikaji. Pada waktu itu, peneliti mencoba untuk mendiskusikan dengan teman dan dosen untuk melihat sejauh mana spesifikasi peneliti yang akan diteliti lakukan. Ternyata melalui beberapa tahap diskusi dan dialog dengan beberapa dosen, kajian yang akan peneliti lakukan disarankan lebih spesifikasi pada lingkup birokrasi dan politik dalam penanggulan bencana. Pemilihan lokasi penelitian, peneliti memfokuskan di Kota Medan. Medan dipilih sebagai lokasi peneliti karena secara geografis kota medan merupakan daerah rawan bencana alam yang kemudian ada sebuah organisasi perangkat daerah yang konsen dalam penanggulangan bencana dan baru didirikan pada tahun 2011 yaitu Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) Kota Medan. Selain itu Kota Medan merupakan tempat tinggal atau domsili asli peneliti, sehingga peneliti lebih mudah dalam mengakses sumber informasi dan data dalam perjalanan penelitian.

Adapun nara sumber dalam peneliti ini adalah sebanyak 3 orang yang berasal dari Tim Reaksi Cepat (TRC), adapun nama-nama nara sumber dari Tim Reaksi Cepat adalah:

1. M.YUNUS, S.STP
2. ZAKARIA ZUBAIDI, S.Ag
3. SAUT MARULI TUA, S.E

B. HASIL PENELITIAN

1. Kategorisasi Media Center

a. sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara Bapak M.Yunus, S.STP, sosialisasi mengenai penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah serangkaian kegiatan penyampaian pesan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana alam. Penyuluhan tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan berbagai informasi serta mampu berperan dalam membangun kehidupannya. Sosialisasi merupakan bagian penting dalam penanggulangan bencana alam. Sosialisasi dilakukan agar setiap [roses penanggulangan bencana memiliki dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang positif dan berkelanjutan, baik terhadap masyarakat yang terkena bencana maupun terhadap pihak terkait lainnya. Fungsi sosialisasi dalam upaya penanggulang bencana berbasis masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Inisiatif, sosialisasi dilakukan untuk mulai menggerakkan masyarakat agar mampu waspada dan mengantisipasi bahaya bencana

2. Sosialisasi, berfungsi untuk menyebarkan berbagai informasi awal mengenai rencana tindak mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitas, maupun kegiatan rekonstruksi.
3. Preparasi, yaitu menyiapkan masyarakat agar selalu siap dan tanggap untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui satkorlak di wilayah bencana
4. Promosi, yaitu untuk mendukung pemerintah agar setiap upaya positif
5. Partisipasi, yaitu meningkatkan dukungan dan keterlibatan berbagai elemen
6. Dseiminasi, yaitu untuk menyebarluaskan program-program pemerintah melalui sosialisasi

2. Kategorisasi Efektivitas Media Center Terhadap Tugas-Tugas Tim Reaksi Cepat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Yunus, S.STP diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pelaksanaan

Pelaksana kegiatan Penanggulangan bencana di kota medan dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan masyarakat

b. Pemanfaatan

Adanya pemanfaatan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dalam mengatasi atau menanggulangi bencana di kota medan.

c. Hasil

Adapun hasil dari penanggulangan bencana di Kota Medan adalah BPBD Kota Medan (kami, 30 maret 2017). Penyerahan korban kebakaran pada tanggal 25 maret 2017 yang lalu.

3. Analisis Potensi Bencana Alam di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Yunus, S.STP angka kejadian bencana alam terus meningkat setiap tahunnya. Hal mendasar adalah berbicara prospek pemerintah daerah dalam menganalisis potensi bencana alam di Kota Medan. Nara sumber pun menjawab pertanyaan dengan sebuah argumentasi utama bahwa hal yang mendasar pemerintah daerah dalam menganalisis bencana alam di Kota Medan adalah secara geografis berada dalam satu lipatan, patahan bumi terdiri dari wilayah dataran tinggi, dataran sedang, dan rendah mengakibatkan bencana yang terjadi lebih bervariasi pula, sehingga atas dasar tersebut bisa dikatakan Medan merupakan daerah rawan akan bencana alam, terbukti dengan runtutan kejadian-kejadian bencana alam yang sekarang terjadi.

Bencana alam yang sering terjadi di Kota Medan adalah kebakaran dan banjir. Daerah rawan yang mengalami banjir adalah Medan Maimun, Medan Belawan, Medan Polonia, Medan Marelan, Medan Helvetia, Medan Johor, Medan Sunggal dan Medan Selayang. Meniyikapi hal fenomena ini, pemerintah bersama dengan segenap lapisan masyarakat bersatu padu dalam menanggulangi bencana sehingga dapat menyelamatkan jiwa maupun harta benda yang terkena bencana.

4. Peranan Tim Reaksi Cepat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zakaria Zubaidi, pada situasi darurat bencana, kita sering mendengar informasi yang berbeda-beda mengenai jumlah korban dan kerusakan yang terjadi, selain itu pada pelaksanaan darurat pun sering terjadi distribusi bantuan yang tidak merata, tidak adanya kerja samanya antara berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagainya. Situasi-situasi seperti ini biasanya disebabkan karena kurangnya koordinasi pemangku kepentingan atau instansi terkait.

Secara garis besar, sistem komando tanggap darurat bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan untuk mensinergikan dan mengintegrasikan pemanfaatan semua sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, peralatan maupun dana atau anggaran

1. Informasi tentang kejadian awal bencana. Informasi ini bisa didapatkan dari berbagai sumber, dengan membuat rumusan sederhana:

- Apa : Jenis Bencana
- Kapan : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
- Dimana : lokasi/tempat/daerah bencana
- Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
- Mengapa : penyebab terjadinya bencana
- Bagaimana : upaya apa yang telah dilakukan dan kebutuhan apa yang sangat mendesak

2. Penugasan Tim Reaksi Cepat. Dari informasi tentang kejadian awal bencana, kemudian pemerintah atau instansi terkait biasanya langsung menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk segera melakukan tugas pengkajian ke lokasi bencana secara cepat dan tepat serta memberikan dukungan dalam kegiatan tanggap darurat.
3. Penetapan status atau tingkat bencana. Berdasarkan dari point 2 di atas maka pemerintah akan menetapkan status atau tingkat bencana. Pada tahap ini juga terkadang pemerintah akan menunjukan atau menugaskan seorang pejabat sebagai komando tanggap darurat bencana sesuai dengan status atau tingkat bencana.
4. Pembentukan komando tanggap darurat bencana. Pemerintah dalam hal ini Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota akan mengeluarkan surat keputusan pembentukan komando tanggap darurat bencana dan segera mengaktifkannya.

5. Peranan Media Center

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Yunus, S.STP untuk melakukan penyebaran informasi terkait perkembangan penanganan bencana diperlukan adanya sosialisasi peraturan kepala BNPB tentang media center tanggap darurat bencana. Dalam sambutannya “ketika pemberitaan kejadian

bencana merapi, sulitnya mendapat informasi terkait perkembangan kejadian bencana tersebut”. Informasi sangat sulit diperoleh dan beritanya simpang siur.

Media center tanggap darurat bencana ini merupakan pusat informasi tentang bencana yang terjadi dan perkembangan penanganan bencana tersebut dapat diakses bagi masyarakat, media, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berasal dari nara sumber berkompeten terkait dengan penanganan bencana

6. Pelaksanaan Mitigasi di Wilayah Rawan Bencana Banjir di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Yunus, S.STP diperoleh nama-nama petugas untuk daerah rawan bencana sebagai berikut :

1. Medan Marelan: Duga P & Suryadi
2. Medan Johor: Alghafani & Dasopang
3. Medan Maimun: Riky HP & Suwandi Chandra
4. Medan Sunggal: Fernandus & Heri
5. Medan Selayang: Sofyan & Joko
6. Medan Polonia: Iqbal & M. Arif
7. Medan Labuhan: M. Taufik & M. Ilham
8. Medan Belawan: C. Azhar & Imam soekoco

C. Pembahasan

Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami dan aktivitas manusia, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor. Karena ketidakberdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah dan menghindari bencana dan daya tahan mereka. Dengan demikian, aktivitas alam yang berbahaya tidak akan menjadi bencana alam di daerah tanpa ketidakberdayaan manusia, misalnya gempa bumi di wilayah tidak berpenghuni.

Penanggulangan bencana alam tentunya membutuhkan upaya-upaya yang terorganisir dan sistematis agar tercipta sebuah penanganan yang efektif dan efisien. Pemikiran tersebut mendasari peneliti untuk menanyakan kepada nara sumber bagaimana manajemen dalam penanggulangan bencana yang dilakukan. Manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Medan meliputi pra bencana, saat bencana (emergency respon), dan pasca bencana.

Peran dalam penanggulangan bencana tentunya tidak melihat pada satu instansi, namun tentunya berada di stakeholder lainnya, salah satunya Dinas Kesehatan. Pola manajemen penanggulangan bencana pun mereka lakukan, walaupun secara tidak langsung Dinas Kesehatan berada dibawah garis koordinasi dan komando BPBD .

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 dan pasal 19 Undang-undang nomor 24 Tahun

2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam rangka pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan pasal 12 huruf h, perlu menetapkan tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, akhirnya pemerintah pun memutuskan dan mengesahkan perka BNPB nomor 03 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan BPBD

Kepala bagian organisasi sekretaris daerah Kota Medan memaparkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Medan dalam penanggulangan bencana di dasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 41 tentang pedoman pembentukan organisasi perangkat daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar sistem koamndo tanggap darurat bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan untuk mensinergikan dan mengintegrasikan pemanfaatan semua sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, peralatan maupun dana atau anggaran
2. Sosialisasi mengenai penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah serangkaian kegiatan penyampaian pesan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rwan bencana
3. Media Center tanggap darurat bencana ini merupakan pusat informasi tentang kebencanaan yang terjadi dan perkembangan penanganan bencana tersebut dapat diakses bagi masyarakt, media, dan pihak-pihak yang membutuhkan
4. Media center tanggap darurat bencana merupakan bagian dari struktur organisasi komando tanggap daurat bencana baik di tingkat nasional, provinsi maupun kota.keberadaan media center tanggap darurat bencana adalah seiring dengan beroperasinya komando tanggap darurat di suatu wilayah bencana pada saat masa tanggap darurat bencana.

B. Saran

1. Kepala pemerintah agar meningkatkan manajemen antisipasi dan penanggulangan bencana.
2. Pemerintah agar memiliki lembaga atau badan khusus bahkan mungkin yang lebih tinggi yaitu setingkat menteri untuk mengantisipasi penanggulangan bencana.
3. Pemerintah agar memberikan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah bencana, bagaimana cara mengatasi bencana yang terjadi.
4. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan, karena sebagian bencana yang terjadi di akibatkan oleh kerusakan lingkungan.
5. Sedapat mungkin tidak tinggal di tempat atau daerah bencana, agar tidak terjudo korban dan kerugian yang besar.
6. Masyarakat pada umumnya harus mengetahui baik melalui media elektronik(radio, TV dan internet) maupun media cetak (bukuliteratur, surat kabar, amajalah) tentang bencana-bencana yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi atau menyelamatkan diri

DAFTAR PERTANYAAN

1. Kapan Media Center ini terbentuk?
2. Apa tugas dan fungsi Media Center?
3. Bagaimana Media Center melakukan sosialisasi penanggulangan bencana?
4. Apa hubungan Media Center dengan Tim Reaksi Cepat?
5. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Media Center dengan Tim Reaksi Cepat?

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Wijaya. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ali, Muhammad. 1997. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa
- Cangara, Hafied. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Djoenaesih Sunarjo. 1983. *Opini Publik*. Yogyakarta: Liberty.
- Effendy, Onong Uchjana, 1990. *Komunikasi Teoridan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Fisher, A. 1978. *Esensi Komunikasi*. Ahli Bahasa Oetarevia. Jakarta: Salemba Empa.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131 tahun 2003*: Jakarta. 2003.
- Liliweri, Alo. 1992. *Komunikasi Antarpribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rakhmat, Jalaludin. 1986. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendy. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66: Jakarta. 2007.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.:
Jakarta. 2007.